

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

ASEAN sejak lama telah berupaya untuk menangani, atau setidaknya meminimalisir, masalah terorisme yang kerap terjadi di kawasan. Beberapa sumber artikel mengatakan bahwa tindakan terorisme yang kerap terjadi di Asia Tenggara mengalami beberapa pergeseran. Semula yang sering terjadi di daratan, kini justru banyak ditemukan kasus terorisme di wilayah perairan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terorisme yang terjadi di perairan Asia Tenggara seringkali kasat akan pembajakan laut. Meskipun, keduanya memiliki definisi serta faktor yang berbeda. Meningkatnya tindakan terorisme di Asia Tenggara menghasilkan banyak suara miring mengenai kecakapan ASEAN dalam mengatasi masalah tersebut. Banyak peragu yang mempertanyakan bentuk konkret dari kerjasama atau kesepakatan yang diambil oleh negara anggota ASEAN dalam beberapa forum atau pertemuan.

ASEAN, sebagai organisasi regional, turut merespon. Terlebih, jika wilayah perairan tersebut termasuk jalur vital bagi Asia Tenggara. Sebab, selain mempunyai potensi sumber daya yang ekonomis bagi dua negara yang berbatasan, Indonesia dan Filipina, Laut Sulu-Laut Sulawesi juga menjadi jalur alternatif bagi kapal kargo bermuatan besar yang tidak bisa melewati Selat Malaka karena alasan berat muatan atau kondisi geografis selat yang beresiko fatal bagi keselamatan awak. Dengan begitu, Laut Sulu-Laut Sulawesi jadi sasaran strategis bagi jalur perdagangan internasional. Itu pula yang menjadi alasan meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut. ASEAN melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) mencoba merumuskan beberapa langkah atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di perairan kawasan. Dengan mekanisme Confidence Building Measures (CBM) dan Preventive Diplomacy (PD), AMF diharapkan dapat menjadi jawaban atas maraknya tindakan kekerasan di Asia Tenggara.

Mekanisme Confidence Building Measures dan Preventive Diplomacy ASEAN Maritime Forum (AMF) dapat menurunkan aksi terorisme dan pembajakan di Laut Sulu-Laut Sulawesi tahun 2015-2020. AMF melakukan perkembangan menjadi EAMF di tahun 2012. Perkembangan ini membuka ruang kerjasama negara anggota ASEAN dengan negara non-ASEAN. Kerjasama trilateral (TCA) yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dilakukan dengan mengadopsi operasional milik Malacca Straits Patrol (MSP). Model patroli yang mereka lakukan juga didasari oleh CBM dan PD serupa milik AMF. Hal itu terlihat dari perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut dalam melahirkan sebuah kebijakan untuk mengadakan patroli bersama, memberikan bantuan terhadap korban, membentuk pusat koordinasi pertukaran informasi di setiap negara, serta membentuk jaringan telekomunikasi untuk negara yang terlibat.

Ada empat indikator untuk pengimplementasian CBM yang juga berkaitan dengan hasil dari PD yang dilakukan oleh AMF, di mana keempat indikator ini menguatkan peran AMF dalam mengatasi aksi terorisme dan pembajakan laut di Laut Sulu-Laut Sulawesi. Empat indikator tersebut yakni deklarasi informasi, prosedur komunikasi, kegiatan pengamatan atau observasi, dan upaya stabilisasi. Dari keempat indikator pengimplementasian CBM dan PD ini, AMF kemudian menghasilkan bentuk kerjasama lain yang lebih luas dan terbuka, seperti kerjasama ASEAN dengan Australia dan pengembangan ASEAN Coast Guard Forum (ACF). Melalui empat indikator ini, AMF juga tidak hanya berfokus pada keamanan maritim saja, tetapi juga keselamatan navigasi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pantai. Dari mekanisme CBM dan PD, serta hasil penguatan peran melalui indikator yang dipenuhi, AMF dapat menjadi instrumen bagi negara anggota ASEAN sebagai inisiator pembuat kebijakan dalam mengatasi aksi terorisme dan pembajakan laut di perairan Asia Tenggara, khususnya di Laut Sulu-Laut Sulawesi. Sehingga, AMF sekaligus dapat berperan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui diskusi forum aktif yang dilakukan setiap tahun, pengembangan kerjasama melalui EAMF, serta menginisiasikan bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh negara anggota dalam menekan angka terorisme dan pembajakan laut di perairan kawasan.

Dari hasil penelitian mengenai mekanisme Confidence Building Measures (CBM) dan Preventive Diplomacy (PD) AMF dalam Mengatasi Aksi Terorisme dan Pembajakan Laut di Laut Sulu - Laut Sulawesi Tahun 2015 – 2020 ini, dapat disimpulkan bahwa AMF berkontribusi atas pencegahan aksi terorisme dan pembajakan laut di Laut Sulu-Laut Sulawesi melalui diskusi dari forum pertemuan yang digelar setiap tahun. Dari beberapa argumen, mengatakan bahwa penguatan kerjasama ASEAN masih tetap harus dilakukan. Selain untuk merealisasikan prinsip CBM dan PD yang diusung ASEAN sejak awal, juga untuk melanggengkan solidaritas negara anggota dalam menjaga stabilitas kawasan. Untuk itu, ASEAN masih mempunyai kesempatan untuk menguatkan kerjasama mereka dan memiliki kesempatan untuk mematahkan suara sumbang yang kerap terdengar dari beberapa peragu.

6.2 Saran

Dari hasil pengumpulan sumber referensi serta data untuk merampungkan penelitian ini, terdapat beberapa usaha lebih lanjut atau justru lebih mendalam terkait dengan peran AMF dalam menangani aksi terorisme dan pembajakan laut di kawasan. Khususnya di Laut Sulu-Laut Sulawesi, yang dikenal sebagai wilayah perairan paling berbahaya kedua di Asia Tenggara setelah Selat Malaka. Secara umum, ASEAN benar-benar harus menggalakkan implementasi dari CBM dan PD terhadap aksi kejahatan maritim di kawasan. Terlepas dari prinsip non-intervensi yang kadang membuat ASEAN menahan diri, ASEAN harus memformulasikan kembali langkah yang tepat untuk membentuk forum diskusi operasional yang bisa menghasilkan kebijakan operasi militer untuk kepentingan stabilitas kawasan.

Secara khusus, pembahasan diskusi dari AMF seiring dengan perkembangannya menunjukkan perubahan yang signifikan. Semula yang hanya membahas mengenai keamanan maritim dan elemen yang ada di dalamnya, kini telah berkembang dengan membahas beberapa topik seperti keselamatan maritim, keselamatan awak kapal, keselamatan navigasi, penangkapan ikan secara ilegal, ekosistem sumber daya, hingga lingkungan maritim dan lingkungan tepi pantai. Jika ASEAN mampu mengembangkan AMF lebih lanjut, maka tujuan dan peran

AMF dalam menangani permasalahan di atas akan tepat sasaran dan tidak ada lembaga sektoral ASEAN yang tujuan dan fungsinya tumpang tindih satu sama lain.